

TERBENTUKNYA PROVINSI BANTEN, DINAMIKA PEMERINTAHAN DI BANTEN, TERBENTUKNYA DINASTI POLITIK, HEGEMONI SELAMA MASA REFORMASI HINGGA KINI

Agus Rustamana¹, Siti romdona², Amanda assyifa melati³, Muhammad fikri adha⁴, Mutiara assyfa wijaya⁵, Nurunnisa miladina⁶

Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kita Serang

E-mail: *agus.rustamana@untirta.ac.id¹, romdona666@gmail.com², assyifamnd127@gmail.com³, adha2942@gmail.com⁴, mutimutiara952@gmail.com⁵, nisamiladina@gmail.com⁶

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis proses pembentukan Provinsi Banten, dinamika pengaturan wilayah, serta perkembangan dinasti politik yang berpengaruh sejak era Reformasi hingga saat ini. Pembentukan Banten pada tahun 2000 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 didorong oleh keinginan masyarakat yang merasa terabaikan dalam pembangunan dan ingin mengelola potensi daerah secara mandiri. Namun, pelaksanaan otonomi daerah memberikan peluang bagi elit lokal untuk menguatkan kekuasaan mereka. Dinasti politik, khususnya yang dikelola keluarga Ratu Atut Chosiyah, menjadi karakteristik utama politik Banten melalui patronase, dominasi partai, serta penguasaan sumber daya ekonomi dan simbol budaya sebagai legitimasi. Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder dari jurnal, dokumen resmi, dan sumber yang dapat dipercaya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dominasi politik di Banten dibentuk oleh kekuatan ekonomi, jalinan kekerabatan, dan pengakuan budaya, yang berdampak pada minimnya persaingan serta akuntabilitas pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan demokrasi lokal dan keterlibatan masyarakat di masa mendatang

Kata kunci

Provinsi Banten; otonomi daerah; dinasti politik; hegemoni kekuasaan; politik lokal.

ABSTRACT

This study analyzes the process of establishing Banten Province, the dynamics of regional governance, and the development of influential political dynasties from the Reformation era to the present. The establishment of Banten in 2000 through Law No. 23 of 2000 was driven by the desire of a community that felt neglected in development and wanted to manage the region's potential independently. However, the implementation of regional autonomy provided opportunities for local elites to strengthen their power. Political dynasties, particularly those managed by the family of Ratu Atut Chosiyah, became a major feature of Banten politics through patronage, party domination, and control of economic resources and cultural symbols as legitimacy. This study applies a qualitative-descriptive approach using secondary data from journals, official documents, and reliable sources. The results reveal that political dominance in Banten is shaped by economic power, kinship networks, and cultural recognition, which have resulted in a lack of competition and accountability in local government. Therefore, this study emphasizes the importance of strengthening local democracy and community involvement in the future.

Keywords

Banten Province; regional autonomy; political dynasty; power hegemony; local politics.

1. PENDAHULUAN

Provinsi Banten resmi berdiri pada tanggal 4 oktober 2000 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Pembentukan Provinsi ini merupakan respons terhadap aspirasi masyarakat Banten yang telah lama menginginkan otonomi, dengan alasan keterpinggiran dalam pembangunan serta keinginan untuk mengelola potensi daerah secara mandiri. Wilayah Banten memiliki akar sejarah panjang, dahulu bagian dari kerajaan atau kesultanan, kemudian koloni, dan akhirnya bagian dari provinsi lain.

Di masa lalu, wilayah ini dikenal sebagai bagian dari kerajaan-kerajaan seperti Kesultanan Banten. Dulu banten bernama Bantam, dan pada abad ke-5 menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Setelah Tarumanegara runtuh, wilayah Banten diambil alih oleh Kerajaan Sunda. Pembentukan provinsi baru ini bukan semata pemisahan administratif, tetapi juga wujud aspirasi masyarakat Banten untuk memiliki ruang otonomi lebih besar, mengelola potensi sendiri, serta menegaskan identitas dan sejarah mereka.

Setelah terbentuk sebagai provinsi, struktur pemerintahan di Banten mulai menyesuaikan dengan status baru tersebut. Pembentukan lembaga pemerintah provinsi, serta pemekaran wilayah administratif (kabupaten/kota) menjadi bagian penting dari dinamika pemerintahan di Banten Misalnya, dalam perkembangannya wilayah di Banten mengalami pemekaran, sebelumnya terdiri dari beberapa kabupaten dan kota, dimekarkan menjadi delapan wilayah administratif yaitu empat kabupaten dan empat kota. (Wijono, 2017). Dinamika ini juga menunjukkan bahwa pembentukan provinsi banten bukan sekedar aspek formal tetapi bagian dari upaya merevitalisasi identitas lokal, potensi alam dan sosial kultural, serta memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Meski Banten secara resmi "baru" sebagai provinsi sejak 2000, kehidupan politik di tingkat lokal dan provinsi menunjukkan pola yang menarik yaitu munculnya "dinasti politik". (Sutisna, 2017). bahwa sejak menjadi provinsi, Banten diwarnai oleh konsolidasi kekuasaan oleh keluarga atau klan tertentu baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. (Sutisna, 2017). Fenomena ini menunjukkan bahwa keberlanjutan dinasti politik di Banten tidak semata karena akar sejarah yang kuat, tetapi juga strategi politik dimana mobilisasi relasi kekerabatan, kontrol atas struktur elite, dan rendahnya partisipasi politik masyarakat sebagai basis reproduksi kekuasaan. (Sukri, 2020). Selain itu, transformasi sosial politik pasca era otoritarian (Orde Baru), termasuk desentralisasi dan otonomi daerah membuka ruang bagi kelompok lokal, seperti elit muslim dan "jawara" (tokoh lokal), untuk memperoleh posisi kekuasaan informal maupun formal.

Dengan demikian, sejak masa reformasi hingga kini, hegemoninya cenderung didominasi oleh kombinasi elit politik formal, jaringan kekerabatan, dan struktur kekuasaan lokal yang tertanam, sehingga hal ini menjadi karakter khas pemerintahan dan politik di Banten.(Irfani et al., 2018)

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif dengan tujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai proses terbentuknya Provinsi Banten serta perkembangan politik dan pemerintahan daerah tersebut sejak masa reformasi hingga periode masa kini. Sumber data yang dipakai sepenuhnya berupa data sekunder, diperoleh melalui jurnal ilmiah, artikel, arsip resmi pemerintah, dan media terpercaya yang menyoroti isu sejarah maupun politik di Provinsi Banten. Tahapan penulisan dimulai dengan pengumpulan referensi, dilanjutkan dengan klasifikasi data menurut tema-tema pokok, yakni proses pembentukan Provinsi Banten, dinamika penyelenggaraan pemerintahan, dan munculnya dinasti politik. Selanjutnya, data dianalisis serta ditelaah secara mendalam sehingga terbentuk uraian yang sistematis, logis, dan saling berkaitan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan Provinsi Banten melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tidak hanya merupakan proses administratif, tetapi juga manifestasi dari aspirasi masyarakat yang selama bertahun-tahun merasa terpinggirkan dalam pembangunan oleh pemerintah provinsi induk. Dorongan untuk mengelola potensi daerah secara mandiri menjadi faktor utama munculnya gerakan pemekaran wilayah. Setelah resmi menjadi provinsi, Banten memasuki fase penataan ulang sistem pemerintahan, termasuk pembentukan lembaga struktural dan pemekaran kabupaten/kota untuk mendukung efektivitas otonomi daerah. Namun, proses ini sekaligus membuka ruang bagi elit lokal untuk mengonsolidasikan kekuasaan melalui mekanisme politik yang berjalan.

Dalam konteks politik lokal, penelitian menemukan bahwa perkembangan Banten pasca pemekaran menunjukkan kecenderungan kuat terhadap terbentuknya dinasti politik. Keluarga Ratu Atut Chosiyah menjadi contoh paling dominan dalam struktur kekuasaan daerah. Dinasti ini berhasil mempertahankan pengaruh melalui strategi patronase, penguasaan sumber daya ekonomi, serta pengendalian jaringan partai politik. Relasi kekerabatan menjadi instrumen utama dalam mengisi posisi jabatan strategis, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dinamika politik lokal di Banten tidak hanya ditentukan oleh kompetisi elektoral, tetapi juga oleh jaringan kekuasaan informal yang telah mengakar.

Selain patronase, legitimasi budaya turut memainkan peran penting. Identitas sosial Banten yang historis, dengan keberadaan kelompok kesultanan, tokoh lokal (jawara), serta elit agama, menjadi modal simbolik yang memperkuat dominasi politik kelompok tertentu. Hegemoni kekuasaan ini berdampak pada terbatasnya akuntabilitas pemerintahan dan lemahnya mekanisme pengawasan publik. Minimnya persaingan politik menyebabkan proses demokratisasi berjalan kurang optimal, sehingga ruang partisipasi masyarakat menjadi sempit. Pola ini menunjukkan bahwa otonomi daerah yang seharusnya memperkuat demokrasi lokal justru berpotensi menciptakan sentralisasi kekuasaan baru di tingkat daerah bila tidak diimbangi dengan penguatan institusi politik dan masyarakat sipil.

Lebih jauh, temuan penelitian menegaskan bahwa kekuatan ekonomi, jalinan kekerabatan, dan legitimasi kultural adalah tiga pilar utama yang menopang dominasi politik di Banten sejak era Reformasi. Ketiganya membentuk struktur kekuasaan yang sulit ditembus oleh aktor politik lain, termasuk kelompok muda dan masyarakat sipil. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan bahwa masa depan demokrasi lokal di Banten membutuhkan peningkatan transparansi, penguatan partai politik, edukasi politik masyarakat, serta keberanian lembaga pengawasan untuk memutus rantai patronase yang terus direproduksi dalam struktur pemerintahan daerah.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan Provinsi Banten pada tahun 2000 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 bukanlah sekadar perubahan administratif, melainkan respons terhadap aspirasi masyarakat yang merasa terpinggirkan dalam pembangunan oleh provinsi induk. Masyarakat Banten ingin mengelola potensi daerah secara mandiri, didorong oleh akar sejarah panjang wilayah ini yang pernah menjadi bagian kerajaan-kerajaan seperti Tarumanegara dan Sunda. Setelah resmi berdiri, dinamika pemerintahan di Banten melibatkan penataan ulang struktur lembaga provinsi dan pemekaran wilayah menjadi delapan kabupaten dan kota, yang bertujuan meningkatkan efektivitas otonomi daerah (Wijono, 2017).

Namun, proses ini justru membuka peluang bagi elit lokal untuk memperkuat kekuasaan mereka. Dalam perkembangan politiknya, Banten sejak era Reformasi hingga sekarang ditandai oleh munculnya dinasti politik yang kuat, terutama yang dipimpin oleh keluarga Ratu Atut Chosiyah (Sutisna, 2017). Dinasti ini bertahan melalui strategi patronase, penguasaan sumber daya ekonomi, dominasi partai politik, dan relasi kekerabatan yang mengisi jabatan-jabatan strategis di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota (Sukri, 2020). Legitimasi budaya, seperti identitas kesultanan, tokoh lokal (jawara), dan elit agama, juga berperan penting dalam memperkuat hegemoni ini. Akibatnya, persaingan politik menjadi minim, akuntabilitas pemerintah daerah berkurang, dan partisipasi masyarakat terbatas, sehingga otonomi daerah yang seharusnya mendorong demokrasi lokal malah menciptakan sentralisasi kekuasaan baru (Irfani et al., 2018).

Secara keseluruhan, dominasi politik di Banten didukung oleh tiga pilar utama: kekuatan ekonomi, jaringan kekerabatan, dan pengakuan kultural, yang membuat struktur kekuasaan sulit ditembus oleh aktor baru (Sukri, 2020). Penelitian ini menekankan perlunya penguatan demokrasi lokal melalui transparansi, pendidikan politik masyarakat, penguatan partai politik, dan peran aktif lembaga pengawasan untuk memutus rantai patronase yang telah mengakar. Dengan demikian, masa depan Banten bergantung pada keterlibatan masyarakat yang lebih luas agar otonomi daerah benar-benar membawa manfaat bagi semua pihak.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Irfani, F., Nafiudin, I., & Jamaluddin, W. (2018). Political Jawara of Local Moslem Elits Among Banten Oligarchy In Indonesia Aftre The New Order Era. *Jawi*, 1(1), 49–66. <http://ejurnal.radenintan.ac.id/index.php/jawi/article/view/3770>
- Sukri, M. A. (2020). Dinasti Politik di Banten : Familisme , Strategi Politik dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(2), 169–190.
- Sutisna, A. (2017). Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(2), 100. <https://doi.org/10.15294/jpi.v2i2.9329>
- Wijono, R. S. (2017). *Di_Bawah_Bayang-Bayang_Kota_Penataan_Daerah_di_Pro.* September 1999.